BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor .... Tahun 2016 Tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka tertib administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 22);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 32);

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
6. Satuan Administrasi Perangkat Daerah Jabatan Fungsional adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kefungsionalan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenag dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pada Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
9. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksaan tugas umum pemerintah.

BAB II

JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Rincian mengenai Jenis Jabatan Fungsional, Dasar Hukum Jabatan Fungsional, Satuan Administrasi Perangkat Daerah Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 3

(1) Jenjang jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

a. mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) yang linear dengan Jenis Jabatan Fungsional yang diampunya;

b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;

c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional maka Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 ( empat ) jenjang jabatan, yaitu:

a. Jenjang Pertama, yaitu jenjang fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;

b. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;

c. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan Kepangkatan mulai Pembina, Golongan IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c; dan

d. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina utama, Golongan Ruang IV/e.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. mensyaratkan Kualifikasi teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III) ;

b. meliputi Kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode Operasional dari suatu bidang profesi ;

c. terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 ( empat ) jenjang jabatan, yaitu :

a. Jenjang Pemula, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;

b. Jenjang Terampil, adalah Jenjang Jabatan fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/ b sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/;

c. Jenjang Mahir, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan terentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/ b; dan

d. Jenjang Penyelia, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, Pengawas dan Penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat dibawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 5

Jumlah jenis jabatan dan Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume beban kerja dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Bupati dapat mendelegasikan sebagaian wewenang atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.

(3) Petikan Keputusan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.

(4) Tata cara pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dengan keputusan Bupati atau keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mendapatkan tunjangan jabatan fungsional dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya untuk masing- masing jenjang jabatan fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bepedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kelima

Sumpah Jabatan

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung wajib diangkat sumpah jabatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diangkat sumpah jabatan.

(3) Pengangkatan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Keenam

Tim Penilaian Angka Kredit

Pasal 9

(1) Bupati membentuk Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Perangkat Daerah merupakan Pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih tinggi dari yang dinilai serta unsur- unsur lainnya yang terkait.

(4) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dan mempunyai sertifikat sebagai Penilai Jabatan Fungsional dan/atau telah mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Jabatan Fungsional.

(5) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk apabila jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan satu jenis jabatan fungsional paling sedikit 15 (lima belas ) orang.

(6) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan Pertimbangan Keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan dan jumlah pejabat fungsional, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan Kepada Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi atau instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau keputusan pejabat yang berwenang.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan sedang melaksanakan tugas jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengukuhan kembali dalam jabatan fungsional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28);

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 52);

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); dan

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 37);

e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49); dan

f. Peraturan Bupati Bandung Nomor .... Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor ...), dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2016
TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN MENGENAI JENIS JABATAN FUNGSIONAL, DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL, SATUAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH JABATAN FUNGSIONAL DAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

| NO | NAMA JABATAN | DASAR HUKUM | | SATUAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH | INSTANSI PEMBINA | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Administrator Kesehatan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22-12-2000 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesos dan Kepala BKN | Nomor : 251/MENKES-KESOS//SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 2 | Analis Kepegawaian | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 Jo PER/14/M.PAN/6/2008 | BKPPD | BKN | |
| | | Keputusan Kepala BKN | Nomor : 67 Tahun 2006 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 17 Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013 | | | |
| 3 | Analis Kebijakan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 43 Tahun 2013 | Sekretariat Daerah | LAN RI | |
| | | Keputusan Kepala BKN | Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| 4 | Analis Hasil Pasar Pertanian | Peraturan Menpan dan RB | 6 Tahun 2012 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | 59/Permentan/ot.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| 5 | Analis Hasil Pasar Perikanan | Peraturan Menpan dan RB | 25 Tahun 2013 dan tanggal 24 Juli 2013 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan 7 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| 6 | Apoteker | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008, 26 Tahun 2008 Tanggal, 1 Desember 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 54 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 7 | Arsiparis | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 Tanggal 10 Maret 2009 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kantor Arsip Nasional | |
| | | Peraturan Kepala Arsip Nasional | Nomor : 18 Tahun 2009 dan 21 Tahun 2009 Tanggal 2 Desember 2009 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 46 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Asisten Apoteker | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor : 1113/MENKES/PB/XII/2008, 26 Tahun 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 54 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 9 | Asesor SDM | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 41 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012 | BKPPD | BKN | |
| | | Keputusan Kepala BKN | Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 17 Desember 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| | | | | | | |
| 10 | Auditor | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 jo Nomor 51 Tahun 2012 | Inspektorat | BPKP | |
| | | Keputusan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN | Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 66 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 11 | Auditor Kepegawaian | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 40 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012 | BKPPD | BKN | |
| | | Keputusan Kepala BKN | Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 22 Januari 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| | | | | | | |
| 12 | Bidan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor : 1110/MENKES/PB/XII/2008, Nomor 25 Tahun 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 9 Tahun 2010 | | | |
| | | | | | | |
| 13 | Dokter | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2003 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 54 Tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 14 | Dokter Gigi | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2003 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 54 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 15 | Entomologi | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 November 2000 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 396/MENKES-KENSOS/SKB/V/2000 dan no.20 Tahun 2001 Tanggal 08 Mei 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 16 | Epidemolog Kesehatan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 17/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 November 2000 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor : 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 54 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 17 | Fisioterapis | Peraturan Menpan dan RB | Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 Tanggal 19 Januari 2004 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan no.07 Tahun 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 | | | |
| 18 | Guru | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009 | Dinas Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional | |
| | | Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN | Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Mei 2010 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007 | | | |
| 19 | Instruktur Latihan Kerja | Peraturan Menpan dan RB | 36/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 28 Maret 2003 | Dinas Tenaga Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BKN | Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 Tanggal 2003 Tanggal 22 Nopember 2007 | | | |
| | | Peraturan Presiden | 58 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 22 november 2007 | | | |
| 20 | Medik Veteliner | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 52 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 21 | Nutrisionis | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 | | | |
| 22 | P2UPD | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 15 tahun 2009, Tanggal 25 September 2009 | Inspektorat | Kementerian Dalam Negeri | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN | Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 24 Pebruari 2010 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 4 Tahun 2012/ Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 23 | Pamong Belajar | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010 | Dinas Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional | |
| | | Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN | Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pamong Budaya | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tanggal 13 Mei 2008 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | |
| | | Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN | Nomor BP. 37/KP.403/MKP/2010 dan nomor 11 tahun 2010 tgl. 6 April 2010 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 74 thn 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 25 | Paramedik Veteliner | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 53 tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013, | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013 , Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 26 | Pekerja Sosial | Peraturan Menpan dan RB | Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Tanggal 16 Januari 2004 | Dinas Sosial | Kementerian Sosial | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala BKN | Nomor 05/HUK/2004 dan no.09 Tahun 2004 Tanggal 8 Maret 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 61 Tahun 2007 / Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 27 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 13 Tahun 2013, jo Nomor 47 Tahun 2013 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 16 Juli 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| 28 | Pengantar Kerja | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 05 tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014 | Dinas Tenaga Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja | Nomor ..... | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 62 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 29 | Pengawas Benih Tanaman | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 09 tahun 2010, Tanggal 23 April 2010 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 01 Maret 2011 | | | |
| 30 | Pengawas Bibit Ternak | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 02 tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 01 Maret 2011 | | | |
| 31 | Pengawas Ketenagakerjaan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 19 tahun 2010, Tanggal 10 November 2010 | Dinas Tenaga Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BKN | Nomor 15 Tahun 2012 dan 08 Tahun 2012. Tanggal 8 agustus 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 51 Tahun 2007 Tanggal 28 juni 2007 | | | |
| 32 | Pengawas Lingkungan Hidup | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 39 tahun 2011, Tanggal 25 Agustus 2011 | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BKN | Nomor 09 Tahun 2012 dan 06 Tahun 2012, tgl 26 Juli 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor ..... | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Tanggal 11 April 2006 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 39 Tahun 2009, Tanggal 29 Agustus 2009 | | | |
| | | | | | | |
| 34 | Pengawas Mutu Pakan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 22 Tahun 2013, Tanggal 7 Mei 2013 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013, Tanggal 1 Maret 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 35 | Pengawas Perikanan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 01 tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor PB.02/MEN/2012 dan 18 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 36 | Pengawas Sekolah | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 21 tahun 2010, Tanggal 30 Desember 2010 | Dinas Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN | Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Perpres Nomor 108 Tahun 2007, Tanggal 6 Desember 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 37 | Pengendali Dampak Lingkungan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tanggal 16 Agustus 2002 | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BKN | Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 Tanggal 25 September 2002 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 35 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 38 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Peraturan Menpan dan RB | 22 tahun 2010 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Pb01/men/2012 dan 17 tahun 2012 | | | |
| | | Peraturan Presiden | 32 tahun 207/ per ka.bkn no. 39 tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 39 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 Tanggal 23 Mei 2008 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 Tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 40 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Peraturan Menpan dan RB | Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 Tanggal 14 Juni 2004 | Dinas Tenaga Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BKN | Nomor KEP.222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 tahun 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 63 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Penguji Kendaraan Bermotor | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 105/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003 | Dinas Perhubungan | Kementrian Perhubungan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BKN | Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 107 tahun 2006 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 42 | Penilik | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010 | Dinas Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN | Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013 | | | |
| | | | | | | |
| 43 | Penyuluh Kehutanan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 27 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor PB.I/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 19 Tahun 2013 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 44 | Penyuluh Keluarga Berencana | Peraturan Menpan dan RB | Nomor KEP/120M.PAN/9/2004 Tanggal 02 September 2004 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | BKKBN | |
| | | Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala BKN | Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 26 tahun 2014 | | | |
| | | | | | | |
| 45 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 Tanggal 14 Agustus 2000 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKBXII/2000 dan 64.A Tahun 2000 Tanggal 26 Desember 2000 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 46 | Penyuluh Perikanan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 7 Mei 2009 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 61 Tahun 2010 Tanggal 7 Oktober 2010 | | | |
| | | | | | | |
| 47 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo KEP/04/M.PAN/1/2005 Tanggal 13 Januari 2005 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Kementerian Perdagangan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Perindag dan Kepala BKN | Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 60 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | | | | | | |
| 48 | Penyuluh Pertanian | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/20/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN | Nomor 54/Permetaan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 16 tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Perancang Peraturan Perundangan-undangan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22 Desember 2000 | Sekretariat Daerah | Kementerian Hukum Dan HAM | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Kepala BKN | Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 43 tahun 2007/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 50 | Mediator Hubungan Industrial | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tanggal 7 April 2009 | Dinas Tenaga Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BKN | Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009 Tgl: 17 September 2009 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor..... | | | |
| 51 | Perawat | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 25 Tahun 2014 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 52 | Perawat Gigi | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan 32.A Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 53 | Perekam Medis | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 30 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013, | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 4 agustus 2014 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2004 Tanggal 28 Juni 2006 | | | |
| 54 | Perencana | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tanggal 19 Maret 2001 | BPPPD | BAPPENAS | |
| | | Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN | Nomor 1106/Ka /08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 Tanggan 3 Agustus 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 44 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 55 | Pranata Hubungan Masyarakat | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014 | Dinas Komunikasi dan Informasi | Kementerian Komunikasi dan Informasi | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN | Nomor ..... | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 29 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 56 | Pranata Komputer | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 | Dinas Komunikasi dan Informasi | Kementerian Komunikasi dan Informasi | |
| | | Keputusan Bersama Kepala Badan Statistik dan Kepala BKN | Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 39 Thaun 2007 / Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | | | Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007 | | | |
| 58 | Pustakawan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Negara | |
| | | Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN | Nomor..... | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 71 Tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 59 | Radiografer | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 29Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 60 | Sadiman | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 76 tahun 2012 | Dinas Komunikasi dan Informasi | Badan Sandi Negara | |
| | | Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala BKN | Nomor 2/LSN/2013 dan Nomor 9 Tahun 2003 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 105 Tahun 2006 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 61 | Sanitarian | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 62 | Tehnik Pengairan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 63/KEP.MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BKN | Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157AB Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember 2000 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 63 | Tehnik Penyehatan Lingkungan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 66/KEP.MK.WAPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999 | Dinas Lingkungan Hidup | Kementrian Lingkungan Hidup | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BKN | Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember 2000 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 64 | Teknik Jalan dan Jembatan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 64/KEP.MK.WAPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BKN | Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember 2000 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BKN | Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 36 Tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 66 | Teknisi Elektro Medis | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 28Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN | Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 67 | Widyaiswara | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 22 Tahun 2014 | BKPPD | BKN | |
| | | Keputusan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN | Nomor 01 Tahun 2015 dan Nomor 08 Tahun 2015 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 59 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| 68 | Polisi Pamong Praja | Peraturan Menpan dan RB | 4 tahun 2014 tanggal 8 januari 201 4 | Satuan Polisi Pamog Praja | Kementerian Dalam Negeri | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN | - | | | |
| | | Peraturan Presiden | - | | | |
| 69 | Penata Ruang | Peraturan Menpan dan RB | PER /10/M.PAN/6/2007 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BKN | Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor 20 Tahun 2013 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 | | | |
| 70 | Penera | Peraturan Menpan dan RB | Nomor : 128/KEP/M.PAN/122/2002 jo Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Kementerian Perdagangan | |
| | | Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan P:erdagangan dan Kepala BKN | Nomor : 435/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003 | | | |
| | | Peraturan Presiden | Nomor : 70 thn 2007 Tanggal 28 Juni 2007 | | | |
| | Pengelola | | | | | |
| 71 | Pengadaan Barang dan Jasa | Peraturan Menpan dan RB | Nomor 77 Tahun 2012 | Sekretariat Daerah | ~~Sekretaris Daerah~~ LKPP | |
| | | Keputusan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN | Nomor 01 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 | | | |
| | | Peraturan Presiden | | | | |

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER